

## PERSEPSI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG

Rianita Monika<sup>1</sup> dan Wahyu Indra Sakti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Tarumanagara  
E-mail: rianitamonica@gmail.com.

<sup>2</sup> Dosen Magister Teknik Sipil Universitas Tarumanagara  
E-mail: wahyusaidi@gmail.com.

### ABSTRAK

*Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung akan dikembangkan sebagai kota wisata terpadu seluas 1.500 hektar yang didukung oleh berbagai infrastruktur berstandar internasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Strategis Nasional, Tanjung Lesung termasuk dalam salah satu dari 10 tujuan wisata prioritas 2106-2019. Tanggapan publik seperti persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan perlu dipertimbangkan oleh pihak terkait karena dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan wisata Tanjung Lesung dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei melalui wawancara beberapa ahli dan peserta penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa masyarakat kurang aktif dalam memberikan masukan baik berupa pendapat maupun saran. Pada dasarnya, orang dapat merasakan manfaat dan merasa puas dengan program percepatan pembangunan infrastruktur tetapi masih ada persepsi dari sejumlah kecil orang yang khawatir bahwa program ini akan memberikan manfaat bagi sektor swasta dan pemerintah saja. Untuk mengatasi masalah ini, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara intensif oleh pihak terkait untuk meningkatkan persepsi dan partisipasi organisasi non-pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan mereka harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, hubungan timbal balik dan masyarakat dapat memutuskan swadaya mereka secara mandiri.*

**Kata kunci:** proyek infrastruktur, persepsi, partisipasi, orang, pariwisata, KEK Tanjung Lesung

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau disebut RIPPARNAS tahun 2010–2025. Pemerintah telah menetapkan 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan pada tahun 2016. Salah satu yang termasuk ke dalam Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu Tanjung Lesung yang terletak di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Banten.

Desa Tanjungjaya memiliki luas 33 km<sup>2</sup> dan memiliki bentang lahan berupa lembah. Penduduk di Desa Tanjungjaya pada tahun 2014 diketahui berjumlah 6.876 jiwa dan terdiri atas 1.826 rumah tangga (BPS, 2015), dan sebagian dari mereka bermukim di wilayah Tanjung Lesung yang akan dikembangkan menjadi KEK Pariwisata. Tanjung Lesung meskipun akan dikembangkan menjadi KEK pariwisata, namun masyarakatnya

secara umum memiliki kegiatan di luar sektor pariwisata, seperti sektor perikanan, pertanian, maupun sektor ekonomi lainnya. Masyarakat pesisir di Tanjung Lesung merupakan bagian dari masyarakat lokal yang sudah lama dan turun temurun bertempat tinggal dan mendiami wilayah ini, sehingga respon mereka terhadap rencana pengembangan KEK Pariwisata di Tanjung Lesung berupa persepsi, dan peran serta sangat diperlukan karena masyarakat merupakan pihak yang akan paling merasakan dampak dari adanya pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. Persepsi dan peran serta memiliki maksud dasar menjadi instrumen yang memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, didapat pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apa saja faktor – faktor yang menjadi tantangan dalam proses pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya, bagaimana membentuk persepsi masyarakat agar ikut aktif terlibat dalam proses pembangunan serta bagaimana peran serta masyarakat terhadap proses pembangunan Infrastruktur kawasan pariwisata Tanjung Lesung melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi tantangan dalam proses pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya, mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan mengkaji peran serta masyarakat terhadap proses percepatan pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, Provinsi Banten.

## **1.4 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok penelitian, sehingga penelitian ini terbatas pada:

1. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat persepsi dan peran serta masyarakat terhadap proses percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung.
2. Objek penelitian yang ditinjau hanya pada Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, Provinsi Banten.
3. Data – data yang diperoleh dalam penelitian didapatkan dari studi literatur dan studi kasus di lapangan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah terkait dan pihak pengelola kawasan yang berperan dalam perencanaan pengembangan KEK Pariwisata di Tanjung Lesung, sedangkan secara teoretis diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi penulis dan memberikan

sumbangan ilmiah terhadap ilmu pembangunan di wilayah khususnya wilayah pedesaan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Pembangunan**

Terdapat berbagai macam pandangan terhadap konsep pembangunan, sehingga banyak pengertian tentang pembangunan yang ditinjau dari segala aspek. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Todaro (2000), yang mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Jadi pada dasarnya pembangunan merupakan kebutuhan dari tiap individu maupun organisasi guna mencapai tujuan untuk kesejahteraan maupun perubahan suatu kondisi ke arah yang lebih baik.

### **2.2 Manajemen Proyek**

Proyek adalah aktivitas unik untuk mencapai tujuan spesifik dan hasil yang diinginkan dengan mengkoordinasi kejadian atau kegiatan dan aktivitas-aktivitas dalam kerangka waktu tertentu (Davidson, 2000). Pada intinya suatu proyek dalam dunia konstruksi merupakan rangkaian kegiatan dalam proyek yang dilakukan hanya satu kali dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang cukup pendek, sehingga dalam rangkaian suatu kegiatan tersebut akan terdapat suatu proses dalam mengolah sumber daya yang ada dalam proyek yang akan menjadi hasil kegiatan yang berbentuk bangunan jadi (Chasanah, 2013).

Dalam sebuah proses manajemen mengenal urutan pelaksanaan yang terdiri dari tujuan (sasaran) yang diikuti tindakan perencanaan (*planning*), organisasi (*organizing*) dan koordinasi (*coordinating*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan dan pengendalian (*controlling*) secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

### **2.3 Infrastruktur Pedesaan**

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial (Grigg, 1988).

Tujuan Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Masyarakat adalah pertama; mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin dan hampir miskin serta kaum perempuan, termasuk kaum-kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, kedua; meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun tanggung jawab masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur pedesaan, ketiga; meningkatnya peran aktif seluruh masyarakat desa, dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, keempat; meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang kuat, mengakar, representatif, akuntabel dan terpercaya, dan kelima; meningkatnya sinergi masyarakat desa, pemerintah desa,

kecamatan, pemerintah kabupaten, swasta, LSM, ormas, dan lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa.

## 2.4 Manajemen Sumber Daya Manusia

Seiring dengan perkembangan jaman, sumber daya manusia yang berkompeten dibutuhkan untuk menghadapi kemajuan teknologi yang telah berkembang pesat dari waktu ke waktu.

Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi maka sejumlah individu harus dibekali dasar-dasar yang terdapat dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu proses melalui mana kesesuaian diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya (Hall, 1986). MSDM harus berdasar pada suatu konsep bahwa manusia itu bukan robot mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis.

## 2.5 Persepsi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada hakekatnya dalam kaitannya terhadap proyek pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan/siklus proyek, yaitu kegiatan dalam tahap inisiasi (*initiation*), perencanaan (*planning*), desain (*design*), konstruksi (*construction*), serta pengelolaan dan pemeliharaan (*operation and maintenance*) (Sumarto, 2004).

Partisipasi masyarakat pada proyek dapat diuraikan berdasarkan tahapan/siklus proyek, yaitu sebagai mana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Partisipasi berdasarkan Tahapan Proyek

Tahapan Proyek	Lingkup Kegiatan Partisipatif
Identifikasi Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat pemangku kepentingan dengan menggunakan skala prioritas
Studi Kelayakan	Partisipasi masyarakat pada proses studi kelayakan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang digunakan sebagai informasi atau data dalam proses perencanaan sehingga <i>feasibility study</i> yang dilakukan dapat memberikan gambaran dari berbagai aspek (ekonomi, budaya dan sosial, serta teknis)
Desain dan Perencanaan	Sebagai proses untuk menghasilkan suatu rencana yang dilakukan oleh semua pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka, dan juga adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak ( <i>stakeholder</i> ) yang dimulai dari peninjauan kebutuhan/ permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan yang diharapkan
Pengadaan Jasa	Proses pengadaan jasa yang melibatkan masyarakat dapat berfungsi sebagai bagian dari panitia pengadaan atau penyedia jasa, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan tersebut

Pelaksanaan dan Administrasi Kontrak	Pelibatan masyarakat pada proses pelaksanaan dapat berupa sebagai tenaga kerja melalui program padat karya ( <i>labour based</i> ), suplayer material dan peralatan, serta mereka dapat langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan tersebut
Penggunaan dan Pemeliharaan	Dengan pelibatan masyarakat dari awal diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur yang ada melalui program pemeliharaan yang pembiayaan bersumber dari dana swadaya

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah:

1. Pengumpulan data yang diambil adalah dari studi literatur, jurnal dan proyek nyata di lapangan yang menunjang dalam penulisan ini.
2. Melakukan wawancara beberapa ahli dan informan yang terlibat baik dalam pelaksanaan pada proyek maupun yang merasakan dampak dari adanya program tersebut. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah, 2 (dua) orang sebagai wakil dari pemerintahan, 1 (satu) orang sebagai wakil dari pemerintah desa, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat di sekitar kawasan Tanjung Lesung (Tabel 2).

Tabel 2. Daftar Informan yang menjadi Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Ir. Syarif Hidayat, MT	Kepala Dinas	Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang
2	Drs. Salman Sunardi, MPd	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang
3	Astaka	Kepala Desa	Kepala Desa Tanjungjaya
4	W. Sofwan Mandala	Tokoh Masyarakat	Desa Tanjungjaya

3. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif-kualitatif. Dimana data yang didapat berasal dari para ahli dan informan yang berkompeten dan ahli dibidangnya.

### 4. ANALISIS

#### 4.1 Analisis Proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Tanjung Lesung

Pada dasarnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibentuk oleh Pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai macam aktivitas bisnis dan investasi yang dapat mendorong devisa dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Kawasan wisata Tanjung Lesung diharapkan mampu mendongkrak sektor kepariwisataan dengan potensi pariwisata alam yang begitu indah. Pemerintah pun menargetkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk memperkenalkan kawasan pariwisata Tanjung Lesung. Proyek Percepatan Pembangunan ini sudah mulai beroperasi sejak 23 Februari 2015 dan jika berhasil akan memberikan dampak terhadap devisa negara yang cukup besar dari sektor pariwisata.

Berikut merupakan deskripsi proyek percepatan pembangunan infrastruktur yang berada di Kawasan Tanjung Lesung.

Nama Proyek : KEK Pariwisata Tanjung Lesung (KSPN), Banten  
Penetapan : PP No.26 tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012  
Investasi Total : Rp. 92,400 Triliun (hingga 2025)  
Dampak ke Perekonomian : Rp. 26,400 Triliun  
Penanggung Jawab : PT. Banten West Java Tourism Development  
Luas : 1500 ha  
Kegiatan Utama : Pariwisata

Dengan adanya proyek infrastruktur ini, muncul proyeksi tenaga kerja (Tabel 3) yang menerangkan dampak dari adanya Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Tanjung Lesung, maka dari itu diharapkan dapat membuka kesempatan sebesar - besarnya untuk tenaga kerja lokal khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Tabel 3. Proyeksi Tenaga Kerja

<b>Dampak Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Jumlah Proyeksi Tenaga kerja (orang)</b>
Kawasan Pariwisata	200.000
Bandara Banten Selatan	35.000
Jalan Tol Serang-Panimbang	5.000
Sektor Lainnya	75.000

Sumber : Seri Analisis Pembangunan Wilayah Banten, 2015.

Pada Gambar 1 menerangkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di wilayah kawasan Tanjung Lesung antara lain perkerasan jalan lentur (*flexible pavement*), pekerjaan saluran drainase, perkerasan jalan kaku (*rigid pavement*), pekerjaan pembangunan kawasan hotel/*cottage* dan pekerjaan pembangunan Stadion.



Gambar 1. Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Tanjung Lesung  
(Sumber : Hasil Olahan Sendiri)

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para ahli dan informan mengenai proyek percepatan pembangunan didapati respon sebagai berikut:

1. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang.

Hal ini diapresiasi dengan positif dengan harapan dapat mensejahterakan warga dan meningkatkan pendapatan khususnya masyarakat sebagai penikmat hasil pembangunan. Namun terdapat beberapa kendala dan masalah dengan adanya program pembangunan ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada saat pembebasan lahan di beberapa wilayah banyak sekali ditemukan hambatan-hambatan. Masyarakat banyak yang menolak untuk direlokasi dikarenakan masalah harga ganti rugi yang menjadi polemik, karena ada sebagian warga yang menganggap bahwa nilai penggantian terlalu rendah. Untuk mengantisipasi masalah tersebut pihak kami telah berkoodinasi dengan pihak yang berwenang agar mendiskusikan jalan yang akan ditempuh perihal harga ganti rugi tanah dan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Selain itu banyak akses jalan dari sepanjang jalan Terogong Labuan sampai dengan kawasan Tanjung Lesung yang belum laik fungsi, masalah yang timbul berupa jalan yang berlubang hingga retak-retak. Hal ini menjadi perhatian bagi Pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sejumlah titik yang menjadi masalah.
- c. Di kawasan sekitar Tanjung Lesung masih banyak terdapat saluran irigasi yang tidak berfungsi sehingga distribusi air tidak dapat mengalirkan ke rumah-rumah dan sawah sebagaimana mestinya. Pihak kami telah melakukan pembangunan dengan menambah saluran drainase di sejumlah titik desa untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan yang akan meresahkan warga, seperti kekurangan air pada lahan pertanian, tersumbatnya aliran air ke MCK dan sebagainya.

- d. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk menunjang pariwisata dan kawasan ekonomi khusus belum memadai. Saat ini kegiatan pemenuhan air baku oleh pihak Kementerian PUPR masih dalam tahap studi kelayakan.
2. Menurut Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Pandeglang. Masyarakat di sekitar kawasan mengapresiasi tentang percepatan pembangunan karena dengan adanya fasilitas – fasilitas yang menunjang akan menarik para wisatawan sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk berwirausaha. Sejauh ini dari pihak DISBUDPAR telah melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan kawasan pariwisata Tanjung Lesung sebagai destinasi yang ada di provinsi Banten, Seperti mengadakan Festival Tanjung Lesung, menggunakan jasa iklan di berbagai media, menyebarkan destinasi pariwisata melalui sosial media, koran, radio, majalah, brosur dan sebagainya.
3. Menurut Kepala Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang.  
Pihak desa berharap agar proses pengembangan ini tidak terhenti sampai tahap pembangunan kawasan itu saja, melainkan diteruskan hingga sarana penunjang menuju kawasan diselesaikan sesuai dengan perjanjian pihak PT BWJ yang berencana akan membangun jalan akses menuju kawasan. Di sekitar kawasan seharusnya diaktifkan organisasi Lintas Masyarakat (LINMAS) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk membantu dalam pengelolaan agar pihak desa memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pihak desa berharap agar tanah garapan milik PT BWJ dapat disewakan kepada warga menjadi kebun/ladang dengan cara sewa pertahun, dan dengan perjanjian tertulis uang dari hasil sewa lahan tersebut diserahkan sebagian untuk pendapatan desa. Tidak hanya sampai disitu, masyarakat mulai mencari penghasilan lain dengan memulai membuka wirausaha seperti berdagang makanan maupun pakaian di sekitar kawasan untuk menambah penghasilan mereka. Selain dampak positif yang dirasakan oleh warga, terdapat dampak negatif yang banyak ditemukan pada saat pelaksanaan pekerjaan, antara lain :
  - a. Terganggunya aktivitas warga desa akibat keluar masuknya alat – alat berat.
  - b. Banyaknya tenaga kerja pendatang sehingga warga sekitar desa merasa terganggu dengan situasi yang tidak seperti biasanya.
  - c. Warga desa Tanjungjaya banyak yang berdatangan ke kantor Kelurahan untuk menanyakan apakah mereka dapat ikut bergabung (menjadi pekerja) untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan.

#### **4.2 Analisis Persepsi dan Peran Serta Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan Infrastruktur dengan melibatkan masyarakat di desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat keseluruhan agar menjadi lebih baik dan menyenangkan dari keadaan sebelumnya.

Persepsi sebagian besar masyarakat merasakan bahwa mereka hanya kadang-kadang saja dilibatkan didalam menyusun rencana kegiatan pembangunan prasarana dasar yang ada di lingkungannya dan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan bahwa mereka selalu dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan prasarana di lingkungannya. Masyarakat yang selalu terlibat dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan sebagian besar adalah mereka yang menduduki kepengurusan dalam organisasi kemasyarakatan di lingkungannya baik di tingkat RT, RW maupun organisasi LSM.

Dengan adanya pengembangan Tanjung Lesung sebagai KEK Pariwisata akan menimbulkan perubahan fungsi kawasan di wilayah ini, dan hal tersebut telah menimbulkan respon dari masyarakat yang berada di dalamnya. Tanjung Lesung meskipun ditetapkan menjadi KEK pariwisata, namun secara umum masyarakatnya memiliki kegiatan di luar sektor pariwisata seperti perikanan, pertanian, dan sektor ekonomi lainnya. KEK pariwisata meskipun diharapkan dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan masyarakat setempat, namun masyarakat di Tanjung Lesung tentunya akan memiliki respon yang berbeda terhadap rencana tersebut. Respon dan kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah setempat dan pengelola kawasan yang akan melakukan pengembangan di Tanjung Lesung, karena apabila respon dan kepentingan mereka tidak diperhatikan maka dimungkinkan akan terjadi permasalahan-permasalahan dalam proses pengembangan KEK di wilayah ini.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, berikut merupakan hasil wawancara dari beberapa ahli dan informan terkait persepsi dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

#### 1. Menurut Tokoh Masyarakat Desa Tanjungjaya

Sebagian masyarakat di Tanjung Lesung memiliki persepsi yang negatif terhadap rencana pengembangan KEK Pariwisata di wilayah Tanjung Lesung. Persepsi tersebut disebabkan oleh dampak yang telah dirasakan selama ini, dan masyarakat khawatir ketika kegiatan pembangunan tersebut terlaksana akan merasakan kerugian yang lebih besar. Masuknya sesuatu yang baru bagi warga apalagi jika hal tersebut berbau dengan hal-hal yang dianggap modern bisa berakibat hilangnya tradisi atau adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu. Belum lagi dengan adanya kawasan hiburan, maka memungkinkan akan terjadi kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar norma dan asusila seperti tempat prostitusi, minuman keras, diskotik, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka sebaiknya pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya warga Desa Tanjungjaya terhadap kawasan pariwisata Tanjung Lesung. Dan jika bisa warga ikut aktif terlibat dalam kegiatan apapun agar warga dapat merasakan dan menikmati hasil dari pengembangan wilayah yang mereka tempati. Dalam hal peran serta sebagian warga sudah terlibat aktif dalam pekerjaan pemerintah daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan desa sementara dilaksanakan, yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar ada beberapa yang memang memberikan partisipasi tenaga ataupun sumbangan uang, masyarakat cukup partisipatif dalam hal pembangunan, hanya saja tidak semua yang betul-betul berpartisipasi masih ada saja masyarakat yang memang tidak berpartisipasi, alasannya beragam-ragam dari pekerjaan yang hanya ingin bertani saja, mencari ikan di laut, alasan kesehatan ataupun karena memang malas. Misalnya untuk proyek pembangunan drainase, masyarakat turut terlibat dalam pengerjaannya karena mereka dibayar dalam proyek tersebut. Manfaat yang dirasakan warga atas adanya program pemerintahan ini yaitu terbukanya peluang bagi warga untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan, Harga tanah di lahan yang berada di sekitar kawasan pariwisata ikut melambung naik lebih dari dua kali lipat dari harga tanah sebelumnya. Namun banyak warga yang masih benar-benar belum paham dengan memanfaatkan peluang yang ada.

#### 2. Menurut Kepala Desa Tanjungjaya

Upaya dari pihak pengembang dan pemerintah daerah untuk meyakinkan persepsi masyarakat di Desa Tanjungjaya bahwa pengembangan KEK Pariwisata di wilayah mereka

bertujuan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya ketidakpercayaan tersebut yang memicu timbulnya kekhawatiran di sebagian besar masyarakat Desa Tanjungjaya. Masyarakat khawatir bila adanya KEK Pariwisata Tanjung Lesung hanya mendatangkan keuntungan bagi pihak swasta dan pemerintah. Dalam hal ini yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk mengajak warga Desa Tanjungjaya ikut aktif terlibat dalam kegiatan diantaranya mengadakan sosialisasi tentang program percepatan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini, kepala desa, sekretaris desa dan juga aparat desa dalam setiap kesempatan. sosialisasi ini dilaksanakan melalui rapat desa antar pemerintah dan aparat, kemudian mengundang langsung masyarakat dalam pertemuan.

3. Menurut Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Pandeglang.

Tabel 4. Jenjang Partisipasi Masyarakat

No	Bentuk Partisipasi	Teori	Realisasi
Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan			
01.00	Setiap penyelenggaraan terutama dalam kehidupan bersama, masyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan	√	X
Partisipasi dalam pelaksanaan			
02.00	Hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan yang terwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi berguna bagi pelaksanaan pembangunan.	√	√
Partisipasi dalam memanfaatkan hasil			
03.00	Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada.	√	√
Partisipasi dalam evaluasi			
04.00	Masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai	√	X

Keterangan :

√ = Realisasi sesuai dengan teori

X = Realisasi tidak dilaksanakan / tidak sesuai dengan teori yang ada

Masyarakat di sekitar kawasan khususnya di Desa Tanjungjaya sangat mengapresiasi dan mendukung atas program pemerintah untuk melakukan pembangunan di KEK Tanjung Lesung. Sebagai perwujudan dari adanya program tersebut, masyarakat berantusias untuk meningkatkan dan mengenalkan produk-produk kerajinan tangan maupun makanan khas daerah Banten. Hasil dari produk tersebut didukung oleh program pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Produk tersebut dapat berupa

keranjang dari anyaman bambu, batik khas Pandeglang, gula aren, emping melinjo dan sebagainya.

Dari hasil pengamatan, didapat perilaku masyarakat di sekitar kawasan dalam hal peran serta dalam membangun. Berikut hasil penelitian antara teori dengan realisasi di lapangan seperti pada Tabel 4

#### 4.3 Analisis Faktor-faktor yang menjadi Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan teori dan analisis Proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Tanjung Lesung maka dapat ditinjau oleh Peneliti dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Berikut faktor-faktor yang didapat dari teori yang dapat diterapkan agar proyek berjalan dengan baik dan lancar, yaitu:

##### 1. Globalisasi Ekonomi

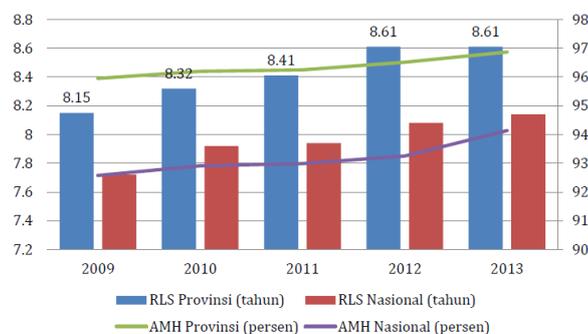
Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi ekonomi dunia telah berkembang pesat. Terutama di setiap negara maju yang tentu memiliki kemampuan untuk menguasai suatu pasar dengan menyebarkan dan memasukkan berbagai produk terhadap negara yang masih berkembang. Dalam hal ini, negara berkembang harus segera bangkit agar mampu bersaing agar perekonomian tumbuh dan mampu membuat kebijakan. Dalam hubungannya dengan proyek pembangunan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dapat disimpulkan :

- a. Produk lokal asli Banten banyak tidak terpakai akibat adanya globalisasi ekonomi.
- b. Tenaga kerja masyarakat tidak terserap khususnya tenaga kerja terdidik.

##### 2. Masalah pengangguran

Masyarakat sebagian besar di wilayah Banten rata-rata masih berpendidikan rendah sehingga timbul masalah pengangguran, antara lain :

- a. Masih banyak masyarakat di sekitar kawasan Banten yang belum memiliki pekerjaan dikarenakan keterbatasan lapangan pekerjaan.
- b. Kualifikasi pendidikan menjadi dasar bagi masyarakat untuk sulit mencari pekerjaan, pada Gambar 2 menerangkan bahwa rata-rata pendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- c. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015.

Gambar 2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013

##### 3. Tanggung jawab sosial sebagai tantangan

Semakin besar pembangunan yang dilakukan, maka harus diakui bahwa semakin besar pula tanggung jawab yang diemban, termasuk tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial diwujudkan dengan kepedulian sosial, meliputi; 1. Penggunaan tenaga kerja setempat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan organisasi sepanjang tenaga kerja lokal tersebut memenuhi berbagai persyaratan administratif dan perundang-undangan, termasuk dalam arti jumlah dan mutunya. 2. Pemanfaatan masyarakat sekitar organisasi sebagai pemasok bahan yang diperlukan. 3. Keterlibatan dalam aktivitas sosial yang berlangsung di masyarakat sekitar. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar dan tidak hanya diperuntukkan bagi para karyawan organisasi dan para anggota keluarganya. 5. Berperan aktif dalam membangun masyarakat sekitar sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dengan kemampuan yang lebih tinggi.

Dalam hubungannya dengan proyek pembangunan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dapat disimpulkan:

- a. Sebagian masyarakat setempat sudah ikut aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
  - b. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan antara pemerintah daerah setempat dengan warga sekitar sehingga sedikit masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan.
  - c. Ada masyarakat yang merasa dengan pekerjaannya sebagai buruh tani dan nelayan sudah nyaman meskipun penghasilan terbatas.
4. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam hubungannya dengan proyek pembangunan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dapat disimpulkan :

- a. Dampak dari adanya proyek pembangunan menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada.
  - b. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara dan suara) sebagai dampak dari adanya pembangunan kawasan.
5. Keanekaragaman tenaga kerja

Manusia di muka bumi ini memang hanya memiliki satu spesies, yakni manusia itu sendiri. Namun, hal yang menjadi perhatian adalah bahwa manusia ternyata memiliki keanekaragaman, baik menyangkut; jenis kelamin, agama, suku, ras, dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan dimana diharapkan tidak terjadinya suatu diskriminasi yang membuat pihak-pihak tertentu tidak dapat bekerja di perusahaan tertentu.

Dalam hubungannya dengan proyek pembangunan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dapat disimpulkan :

- a. Tenaga kerja pada proyek pengembangan pariwisata banyak didatangkan dari luar daerah
  - b. Penggunaan tenaga kerja lokal di sekitar kawasan menjadi berkurang
6. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang wajib mengingat era pembangunan sudah memasuki era globalisasi yang sarat akan persaingan. Dalam persaingan, maka yang terbaiklah tentunya yang akan menang. menciptakan sesuatu yang terbaik dan lebih baik

lagi tentunya adalah dengan teknologi yang semakin mutakhir. Mengembangkan suatu teknologi tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan pula.

Dalam hubungannya dengan proyek pembangunan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dapat disimpulkan :

- a. Banyak daerah yang belum terjamah dengan teknologi pada era saat ini, Banten dikenal kaya dengan unsur kearifan lokal dan beragam entitas budaya tetap eksis sejak dahulu. Contohnya suku Baduy yang hingga saat ini tetap mempertahankan aturan adat istiadat dan tidak mengikuti perkembangan jaman.
  - b. Kurangnya peran pemerintah dalam memajukan dan memperkenalkan teknologi yang sudah ada mengakibatkan sebagian warga khususnya di daerah pedalaman tertinggal jauh dengan daerah lain.
7. Bidang politik sebagai tantangan

Dalam menjalankan suatu pembangunan, biasanya kental akan campur tangan politik dalam menentukan prioritas dan kebijakan. Bidang politik tentunya tidak saja hanya menyangkut partai politik, tetapi bagaimana menjalankan negara ini kedepannya juga termasuk kajian politik. Hal ini tentunya dapat dicontohkan seperti pengaturan angkatan bersenjata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan bahkan di beberapa negara dimanfaatkan untuk membantu keamanan pembangunan suatu negara.

Dalam hubungannya dengan proyek pembangunan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dapat disimpulkan:

- a. Campur tangan politik di wilayah Banten begitu terasa, proyek-proyek konstruksi yang ada di wilayah ini sebagian besar dimonopoli oleh perusahaan.
- b. Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial antar masyarakat

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya sebagian mata pencaharian masyarakat Banten adalah nelayan dan petani, sehingga persepsi mereka terhadap suatu proyek tampaknya masih awam.
2. Dengan latar belakang pendidikan yang rata-rata masih dibawah kualifikasi membuat masyarakat kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan.
3. Tenaga kerja yang didatangkan dari luar mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat dengan pihak pengembang, sehingga sumber daya yang berasal dari wilayah itu sendiri tidak dapat tersalurkan.
4. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan proyek melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap kurang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Keberadaan program pemerintah ini bagi masyarakat setempat khususnya di Desa Tanjungjaya membawa pengaruh positif sebagai sarana aksesibilitas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan investasi dan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Masyarakat di sekitar kawasan Tanjung Lesung khususnya Desa Tanjungjaya perlu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan rencana pembangunan di wilayah tersebut, karena pada dasarnya upaya pembangunan akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dan dampak tersebut diharapkan dapat mendatangkan manfaat serta keuntungan terhadap mereka.
2. Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sedang dan telah dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

**Badan Pusat Statistik** Provinsi Banten Tahun 2015.

**Chasanah, U.** (2013). “Komparasi proyek konstruksi kontraktual dengan Proyek Konstruksi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Undip, Semarang.

**Davidson, Rj.** (2000). “Emotion, plasticity, context, and regulation : perspectives from affective neuroscience”. The American Psychological Association.

**Grigg, N.** (1988). “Infrastructure Engineering and Management”. John Wiley & Sons.

**Hall, T. D.** (1986). “Human Resources Management, Strategy, Design”. Glenview: Scott Foresman and Company.

**Handoko, H.** (2011). “Manajemen Personalia & Sumberdaya manusia”. Penerbit BPFE Yogyakarta, Anggota IKAPI.

**Mondy, R. W.** (2008). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta : Erlangga.

**Peraturan Pemerintah** Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

**Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Banten** Tahun 2015.

**Soetomo.** (2008). “Strategi - Strategi Pembangunan Masyarakat”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Sumarto, H. Sj.** (2004). “Inovasi, Partisipasi, dan *Good Governance*. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia”. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

**Todaro, M. P.** (2000). “Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga”. Jakarta : Erlangga.